

Potret Dimensi Pengukuran Standar Miskin menurut Badan Pusat Statistik dan Konsep Islam (Studi Komparatif)

Muhamad Paizal¹, Srihani², Wahyu Perdana³

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: ipaizal08@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: srihanianatasya@gmail.com

³IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: perdanawahyu456@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
08-03-2023

Direvisi:
11-03-2023

Diterima:
11-03-2023

ABSTRACT

The concept of poverty is a concept that is multidimensional and difficult to be defined singly. So far, the poor concept is still deep the debates and dialogues that should be highlighted and measured are also different based on the perspective adopted. One important aspect to support poverty reduction strategy is the availability of poverty data that accurate. A reliable measure of poverty can be used as an instrument formidable for policy makers in focusing attention on conditions poor man's life. This research was conducted with the aim of compare poverty measurement standards according to BPS and according to concept of Islamic economics. The applied research method is approximation with a qualitative-comparative paradigm. The results of this study reveal that the poverty measurement concepts of BPS and Islamic economics are similar lies in the definition of poor as people who are in shortage and make poverty a major factor of economic problems. The difference is that the BPS measurement concept is oriented the need to survive in a short time, focusing on needs material, and the parameters are temporary. While in concept measurement of the Islamic economy, highlighted material needs and faith, and The parameters used can be enforced over time.

Keywords : *Poverty, BPS Measurement, Islamic Measurement*

ABSTRAK

Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensi dan sulit untuk didefinisikan secara tunggal. Sejauh ini, konsep miskin masih dalam perdebatan dan dialog yang patut disoroti serta pengukuran pun berbeda berdasarkan prespektif yang dianut. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkomparasikan standar pengukuran kemiskinan menurut BPS dan menurut konsep ekonomi Islam. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan dengan paradigma kualitatif-komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa persamaan konsep pengukuran kemiskinan BPS dan ekonomi Islam terletak pada definisi miskin sebagai orang yang berada dalam kekurangan dan menjadikan kemiskinan sebagai faktor utama permasalahan ekonomi. Perbedaannya adalah bahwa konsep pengukuran BPS berorientasi pada kebutuhan untuk bertahan hidup dalam waktu singkat, berrfokus pada kebutuhan materiil, dan parameternya bersifat sementara. Sedangkan dalam konsep pengukuran ekonomi Islam, disoroti kebutuhan materiil dan akidah, dan parameter yang digunakan dapat diberlakukan sepanjang masa.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pengukuran BPS, Pengukuran Islam

Corresponding Author : Muhamad Paizal, IAI Sultan MuhJammad Syafiuddin Sambas, Jalan Raya Sejangkung No. 126, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Prov. Kalimantan Barat , 79460, email: ipaizal08@gmail.com

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017). Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka (BPS, 2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Selanjutnya, sejak tahun 2002 BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota (BPS, 2022).

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2023).

Fenomena kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sering kali juga menyebabkan keterbatasan terhadap akses kebutuhan lainnya seperti akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni. Karakteristik rumah tangga miskin salah satunya dapat diamati melalui kondisi perumahan dan faktor yang menunjang perumahan seperti jenis lantai, dinding, atap rumah, penerangan, sumber air, jenis bahan bakar untuk memasak, sanitasi, dan sebagainya (Faturachman & Molo, 2016).

Pengukuran kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan untuk memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin (Sukmawati et al., 2022). Apalagi untuk ekonomi Indonesia yang mengalami guncangan akibat pandemi covid-19, yang tentu berdampak pada kesejahteraan penduduk baik secara langsung maupun tidak langsung, ada empat alasan mengukur kemiskinan yaitu:

1. Merupakan instrumen yang kuat untuk memfokuskan pembuat kebijakan pada kehidupan orang miskin
2. Mengidentifikasi orang miskin sehingga dapat memberikan intervensi kebijakan yang tepat
3. Memantau dan mengevaluasi proyek dan kebijakan yang digunakan untuk orang miskin
4. Mengevaluasi lembaga yang mempunyai tujuan membantu masyarakat miskin

Dalam pandangan ekonomi Islam, kemiskinan di definisikan sebagai sesuatu yang tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan kesehatan terhadap diri manusia secara menyeluruh (Hamdani, 2015), juga tidak meratanya distribusi bahan pokok terhadap manusia yang membutuhkan. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang di hadapi manusia, dimana kelaparan dan kekurangan merupakan sebab akibat dari kemiskinan, padahal jauh sebelumnya, Islam sudah memerangi kemiskinan. kemiskinan dalam ekonomi islam lebih kompleks dan mendekati realita jika di dibandingkan dengan kemiskinan yang ada dalam ekonomi konvensional, kemiskinan dalam ekonomi Islam tidak melulu masalah duniawi saja tapi juga masalah *ukhrawi*, meskipun ada juga beberapa persamaan dengan ekonomi konvensional untuk pemaknaan kemiskinan material yang paling penting dalam islam sebagai agama yang pertengahan juga memerangi kemiskinan.

Adapun pendekatan terbaru yang di keluarkan dalam Islam yang dikenal dengan CIBEST yang hadir dengan pendekatan baru dalam mengukur kemiskinan (Beik & Arsyianti, 2015). Model CIBEST merupakan alat indeks kesejahteraan yang berbasis ekonomi Islam (Basar Dikuraisyin, 2022). Sebelumnya telah ada penelitian yang dilakukan. Penelitian Arif Riyukuri dan Marliyah Suryadi (2022) yang menganalisis konsep kemiskinan dari BPS dan Ekonomi Islam. Adapun perbedaannya pada penetian Arif Riyukuri dan Marliyah Suryadi (2022) berfokus pada konsep kemiskinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengukuran standar miskin. Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan riset tentang “Potret Dimensi Pengukuran Standar Miskin menurut Badan Pusat Statistik dan Konsep Islam (Studi Komparatif)”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian berbentuk analisis deskriptif, metode kuantitatif dapat dipahami sebagai sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, penelitian yang berupa angka dan analisis data berupa kuantitatif/statistika (Sugiyono, 2017). Data dalam penelitian ini bersumber pada dua sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan kepala seksi statistik sosial BPS Kabupaten Sambas mengenai standar pengukuran miskin dan metodologi perhitungan kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Data sekunder yang didapat dari hasil penelitian yang berhubungan dengan analisis pengukuran kemiskinan dan juga bahan yang diperoleh dari *website*, artikel, jurnal, buku ekonomi Islam, yang dimaksud sebagai pendukung dalam analisis penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengukuran Standar Kemiskinan Menurut BPS

1. Konsep Kemiskinan Menurut BPS

Kemiskinan merupakan kondisi dimana tidak dapat memenuhi hak hak dasarnya untuk mempertahankan kehidupan yang bermartabat (Titin Suhartini, 2015). BPS menggunakan konsep garis kemiskinan atau *poverty line*. Metode pengukuran angka kemiskinan harus konsisten untuk menghasilkan data jumlah penduduk miskin dengan lebih tepat. Data inilah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program. pengentasan kemiskinan. Penyajian data yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kondisi fiilnya akan berdampak pada rendahnya efektifitas program. Data yang tidak tepat juga menyebabkan efisiensi anggaran kemiskinan yang rendah. Pengukuran angka kemiskinan yang dilakukan BPS adalah dengan menggunakan metode garis kemiskinan pengeluaran baik garis kemiskinan non makanan maupun garis kemiskinan makanan. Masing-masing komponen diberi bobot dan

dijumlahkan Pemberian bobot untuk masing-masing komoditi tersebut harus jelas, konsisten dan yang terpenting harus sesuai dengan fakta di masyarakat. Misalnya, beras dipastikan harus mendapatkan bobot yang lebih besar dari pada daging sapi. Bobot dari masing-masing komoditi harus transparan, sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran dan perubahan pembobotan yang dilakukan pada masing-masing komoditi (BPS, 2023).

Selain pembobotan, Dalam penghitungan garis kemiskinan pengeluaran, penduduk referensi merupakan '*sample*' yang juga menentukan besarnya garis miskin. Jika dalam pemilihan penduduk referensi tidak dilakukan sesuai BO BIRD dengan definisi dari penduduk referensi itu sendiri, maka garis kemiskinan yang dihasilkan tidak akan tepat dan pada akhirnya angka kemiskinan yang dihasilkan juga tidak benar (BPS, 2022).

2. Mekanisme Pengukuran Kemiskinan

Menurut Romulus (Kasi Statistik Sosial, 2023) untuk mengetahui penduduk dikatakan miskin atau tidak, dalam hal ini BPS mengukurnya dengan konsep kebutuhan dasar, dilihat dari besaran pengeluaran selama sebulan apakah dia memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak. Untuk mengetahui itu BPS memiliki standar perhitungan yang dinamakan garis kemiskinan (R. A. N. Tambunan, personal communication, January 9, 2023)

Selanjutnya, sebagaimana hasil wawancara dengan Romulus (2023) diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan salah satunya berasal dari data makro hasil Survei Sosial Ekonomi nasional oleh BPS. Penghitungan yang dilakukan BPS ini pada akhirnya dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan. penduduk miskin antar daerah, namun data makro tersebut hanya dapat digunakan untuk target sasaran geografis dan tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu keluarga miskin. Data makro yang dihasilkan tidak dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal karena tidak mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada, sehingga program-program penyelesaian masalah kemiskinan tidak didasarkan pada penyebab kemiskinan itu sendiri (R. A. N. Tambunan, personal communication, January 9, 2023)

3. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) (Hanifah Ramadhani, 2022). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) (Subdirektori Statistik Kerawanan Sosial, 31 Oktober 2018). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan (BPS, 2022).

Rumus Penghitungan:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan: GK: Garis Kemiskinan, GKM: Garis Kemiskinan Makanan, GKNM: Garis Kemiskinan Nonmakanan. Untuk teknik perhitungan GMK, tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai

penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^{\Omega} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{\Omega} V_{jkp}$$

Dimana :

- GKM^*_{jp} : Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p .
- P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p .
- Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p .
- V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .
- j : Daerah (perkotaan atau pedesaan).
- p : Provinsi ke- p .

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} Y_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

- K_{jkp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p
- \overline{HK}_{jp} : Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut (BPS, 2023).

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p

V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p

r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j

k : Jenis komoditi non-makanan terpilih

j : Daerah (Perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke- p

4. Persentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

5. Indeks Kedalaman Kemiskinan

(Poverty Gap Index-PI), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan (BPS-RI, 31 Oktober 2018).

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

6. Indeks Keparahan Kemiskinan

(*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS-RI, 31 Oktober 2018).

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Romulus (2023) dalam wawancaranya mengatakan cara untuk melihat seorang penduduk dikategorikan miskin atau tidaknya dapat dilihat dari garis kemiskinan. Jika seseorang berada dibawah garis kemiskinan maka dia tergolong miskin tapi jika dia diatas garis kemiskinan maka dia tidak dikategorikan miskin. Pada tahun 2022 garis kemiskinan Kabupaten Sambas adalah Rp. 520. 660,00.

Menurut Romulus (2023), seseorang yang dikatakan miskin ialah seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya atau pengeluarannya selama sebulan dibawah garis kemiskinan. BPS melakukan survei yang bernama susenas (survei sosial ekonomi nasional) yang dilaksanakan setiap maret setiap tahunnya. Perhitungan pengeluaran makanan dan non makanan selama seseorang. Misal 1 orang selama sebulan dia hanya mengeluarkan Rp. 400.000,00 sedangkan garis kemiskinan Kabupaten Sambas adalah Rp. 520. 660,00 maka orang tersebut dikategorikan miskin.

Romulus (2023) juga menambahkan bahwa pengukuran kemiskinan tidak langsung dilakukan kepada personal penduduk tetapi melalui rumah tangga keluarga. Jika rumah tangga keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya maka dia tidak dikategorikan miskin. Dalam pengukuran ini yang dilihat terlebih dahulu yakni rumah tangga keluarga baru penduduk secara perseorangan, jika satu rumah tangga dikategorikan miskin maka setiap orang yang berada dirumah itu dikatakan penduduk miskin. Contoh, didalam satu rumah tangga keluarga terdapat 4 orang yang terdiri dari suami, istri dan 2 anak, dalam menghitung pengeluarannya tidak langsung kesetiap individu tetapi dihitung secara satu keluarga, dalam sebulan keluarga tersebut mengeluarkan sebanyak Rp. 2.000.000,00 untuk semua kebutuhan, tetapi berdasarkan garis miskin 1 orang yang dikatakan tidak miskin harus melebihi Rp. 520. 660, 00 sebulan, maka 4 orang tersebut dikalikan Rp. 520. 660, 00 maka dapat diketahui bahwa rumah tangga tersebut pengeluarannya dibawah garis kemiskinan dan dikategorikan miskin. Meskipun salah satu dari keluarga tersebut pengeluarannya melebihi garis kemiskinan namun tetap dikatakan miskin dikarenakan pengukurannya melalui rumah tangga keluarga.

Kriteria untuk menentukan seseorang miskin menurut Romulus (2023), itu berdasarkan pemenuhan kebutuhan, jika dia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau pengeluarannya dibawah garis kemiskinan maka disebut penduduk miskin. Sedangkan seseorang yang terancam miskin ialah orang yang berada dekat dengan garis kemiskinan.

B. Pengukuran Standar Kemiskinan Dalam Islam

1. Konsep Kemiskinan Dalam Islam

Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan ini dalam satu definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Terlepas dari pro kontra dan perdebatan mengenai konsep kemiskinan, namun isu kemiskinan tetap menjadi isu yang sangat penting karena di antara tujuan utama pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin (Murdiyana & Mulyana, 2017). Konsep kemiskinan dalam perspektif syariah memiliki perbedaan dengan konsep konvensional. Islam mendefinisikan kemiskinan kedalam dua kategori yakni fakir dan miskin (Yusril Mahendra, 2021).

Dalam perspektif syariah, terjadinya perbedaan pendapatan yang menjadi penyebab kemiskinan sesungguhnya merupakan *sunnatullah fil hayah* (Muttaqin & Safitri, 2020). Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan sesungguhnya tidak bisa dinafikan. Karena itu, Islam tidak pernah berbicara mengenai bagaimana upaya untuk "menghilangkan" kemiskinan, akan tetapi berbicara bagaimana mereduksi dan meminimalisir kemiskinan ini agar kehidupan yang lebih sejahtera bisa diraih. Caranya adalah dengan mengembangkan sikap saling menolong, saling membantu, saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi.

Dalam pandangan Islam, ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang terkategori sebagai kelompok mampu (Isda et al., 2021). Islam juga menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh terjadi karena faktor malas. Orang miskin yang malas berusaha sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Orang yang suka meminta-minta karena malas bekerja, dalam sebuah hadits Rasul Saw, akan kehilangan wajahnya pada hari kiamat nanti. Justru Islam mengajarkan kepada orang miskin untuk juga mau berinfak, meski dengan jumlah yang sangat sedikit (QS. 3: 134). Jangan sampai orang tidak pernah berbagi sepanjang hidupnya, dengan alasan kemiskinan. Kemiskinan materiil didasarkan pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan materiil sepenuhnya. Kebutuhan materiil ini, seperti sandang pangan dan papan, harus didefinisikan melalui proses analisis dan survei yang tepat, sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat yang ada. Sedangkan kemiskinan spiritual didasarkan pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual minimal, melalui pelaksanaan ibadah yang diwajibkan maupun dianjurkan dalam Islam. Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual ini berbeda penyebabnya.

2. CIBEST Quadrant

Dari definisi kemiskinan materiil, spiritual dan kemiskinan absolut di atas, maka dapat dibentuk suatu kuadran yang disebut dengan kuadran CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies-IPB*). Pembagian kuadran didasarkan pada kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual. Digunakannya rumah tangga sebagai unit of analysis karena Islam memandang bahwa unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga atau rumah tangga. Karena itu, dalam melihat tingkat kemiskinan, maka rumah tangga ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini berbeda dengan BPS yang melihat kemiskinan dari perspektif individu (Beik & Arsyianti, 2015).

Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual ke dalam dua tanda, yaitu tanda positif (+) dan negatif (-). Tanda (+)

artinya rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, sementara tanda (-) berarti rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Dengan pola seperti ini, maka akan didapat empat kemungkinan, yaitu tanda (+) pada pemenuhan kedua kebutuhan material dan spiritual, tanda (+) pada salah satu kebutuhan saja, apakah tanda (+) pada kebutuhan material ataupun tanda (+) pada kebutuhan spiritual saja, serta tanda (-) pada kedua kebutuhan material dan spiritual (Beik & Arsyianti, 2015)

Empat kemungkinan inilah yang kemudian melahirkan empat kuadran, di mana sumbu horizontal melambangkan garis kemiskinan materiil dan sumbu vertikal melambangkan garis kemiskinan spiritual. Pada kuadran pertama, rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual sehingga tanda keduanya adalah (+). Inilah kuadran kesejahteraan. Sejahtera itu adalah manakala rumah tangga atau keluarga dianggap mampu baik secara materiil maupun secara spiritual. Secara ekonomi produktif, secara ibadah juga produktif.

Kemungkinan kedua adalah rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan spiritual (+) akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan materiilnya (-) dengan baik. Kondisi ini, sebagaimana direfleksikan oleh kuadran II, mencerminkan kondisi rumah tangga yang berada pada kategori kemiskinan materiil. Sebaliknya, pada kuadran III, kondisi yang terjadi adalah rumah tangga tergolong mampu secara materiil (+) namun tergolong tidak mampu secara spiritual (-), sehingga mereka berada pada kategori kemiskinan spiritual.

Yang terburuk adalah posisi rumah tangga pada kuadran IV. Pada kuadran ini, rumah tangga atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritualnya secara sekaligus, sehingga tanda keduanya adalah (-). Inilah kelompok yang berada pada kategori kemiskinan absolut. Miskin secara materi dan miskin secara rohani (Beik & Arsyianti, 2015).

Manfaat dari kuadran CIBEST ini adalah terkait dengan pemetaan kondisi keluarga atau rumah tangga, sehingga dapat diusulkan program pembangunan yang tepat, terutama dalam mentransformasi semua kuadran yang ada agar bisa berada pada kuadran I (kuadran sejahtera). Pada rumah tangga yang berada di kuadran II, maka program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan skill dan kemampuan rumah tangga, serta pemberian akses permodalan dan pendampingan usaha, dapat secara efektif dilakukan. Sementara bagi rumah tangga di kuadran III, program yang perlu dikembangkan adalah bagaimana mengajak mereka untuk melaksanakan ajaran agama dengan lebih baik. Misalnya, jika mereka miskin ruhani karena tidak mau berzakat, maka melakukan edukasi tentang zakat dan mendorong mereka berzakat adalah program yang paling tepat.

Sedangkan bagi rumah tangga di kuadran IV, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sisi ruhiyah dan mentalnya terlebih dahulu, baru kemudian memperbaiki kondisi kehidupan ekonominya. Membangun karakter yang berakhlakul karimah adalah modal yang sangat berharga dalam mentransformasi kaum dhuafa agar menjadi lebih sejahtera. Perlu disadari bahwa usaha mentransformasi kaum dhuafa di kuadran IV ini adalah paling berat dan menantang (Beik & Arsyianti, 2015).

Hal penting berikutnya adalah bagaimana menentukan standar kebutuhan minimal materiil dan spiritual ini. Kebutuhan materiil dapat didasarkan pada analisis kebutuhan pokok, minimal mencakup kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Bisa juga ditambahkan kebutuhan akan transportasi dan komunikasi yang semakin diperlukan oleh masyarakat saat ini. Adapun kebutuhan spiritual minimal adalah terkait dengan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat terkait dengan kewajiban agama (Muhammad Afthon Ashar, 2019). Dalam konteks kuadran CIBEST ini, maka ada lima variabel yang dapat didefinisikan sebagai kebutuhan spiritual minimal. Kelima variabel tersebut adalah pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan lingkungan kebijakan pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa shalat, puasa dan zakat adalah termasuk rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan.

3. Indeks Kemiskinan Islami: Model CIBEST

Salah satu alat ukur yang tengah dikembangkan adalah CIBEST Model atau indeks CIBEST. Kuadran CIBEST ini terbagi menjadi empat area, yaitu area kesejahteraan, kemiskinan spiritual, kemiskinan materiil, dan kemiskinan absolut. Indeks CIBEST" ini mencoba menghitung jumlah penduduk yang berada di masing-masing kuadran dan implikasinya terhadap pemerintah. Fokus kebutuhan yang perlu dihitung adalah kebutuhan materiil dan spiritual. Unit analisis dari indeks CIBEST ini adalah rumah tangga/ keluarga. Hal ini dikarenakan keluarga/rumah tangga harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, sama seperti konsep yang dikembangkan BKKBN. Dalam konsep CIBEST, rumah tangga/keluarga ini dibagi menjadi 6 sub kelompok, yaitu: kepala rumah tangga/keluarga, orang dewasa bekerja, orang dewasa tidak bekerja (>18 tahun), remaja usia 14-18 tahun, anak-anak usia 7-13 tahun, dan anak-anak berusia 6 tahun atau kurang dari 6 tahun. Indeks CIBEST ini terdiri dari empat indeks, yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan materiil, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut.

Formula indeks kesejahteraan adalah sebagai berikut:

$$W = W/N$$

Dimana:

W = indeks kesejahteraan; $0 \leq W \leq 1$

w = jumlah keluarga sejahtera (kaya secara materiil dan spiritual)

N = jumlah populasi (jumlah keluarga yang diobservasi).

Pada indeks kesejahteraan ini, kita menghitung jumlah keluarga yang kaya atau cukup secara materiil dan spiritual, lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan populasi. Nilai W berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati nol berarti semakin sedikit rumah tangga/keluarga yang sejahtera di satu wilayah. Semakin mendekati satu berarti proporsi jumlah rumah tangga/keluarga sejahtera semakin besar. Untuk mengetahui apakah suatu keluarga itu berkecukupan secara materiil dan spiritual, maka besarnya kebutuhan materiil dan kebutuhan spiritual minimal harus dihitung terlebih dahulu. Standar kebutuhan materiil ini didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pakaian, makanan, rumah, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dianggap sangat mendasar.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai aplikasi indeks CIBEST, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Sebelum memulai ilustrasi ini, ada 2 (dua) asumsi dasar yang harus terpenuhi:

- a. Data yang dihimpun adalah data primer.
- b. Metode pengumpulan datanya bisa dilakukan melalui sensus atau metode sampling.

Adapun langkah-langkah perhitungan indeks CIBEST adalah sebagai berikut:

- a. Hitung nilai MV terlebih dahulu. Nilai MV dapat dihitung dengan survei tersendiri, atau menggunakan standar nishab zakat penghasilan, atau dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK) resmi yang disesuaikan dengan basis keluarga. Misalnya GK per kapita BPS per September 2013 adalah sebesar Rp 292.520,- GK per kapita ini dikalikan jumlah anggota keluarga, sehingga menjadi nilai MV (Garis Kemiskinan Materiil). Untuk nilai SV (Garis Kemiskinan Spiritual) adalah sama dengan 3.
- b. Hitung nilai SH dan pendapatan bulanan keluarga.

- c. Tempatkan setiap keluarga yang diamati ke dalam kuadran CIBEST, apakah kuadran I, II, III maupun kuadran IV.
- d. Hitung semua indeks, baik indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan materiil, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut dengan menggunakan data yang ada.

C. Perbandingan Pengukuran Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Ekonomi Islam

Pencapaian dalam kemiskinan BPS belum mampu mengubah posisi masyarakat miskin untuk lepas dari masalah kekurangan harta. Sedangkan sejarah dalam Islam pernah mencatat bahwa kemiskinan bukan lagi pada permasalahan kekurangan harta, tetapi posisi miskin adalah posisi seseorang yang diurutkan sesuai dengan jumlah harta yang dimilikinya. Maksudnya adalah pada masa kejayaan Islam yaitu masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, orang yang kekurangan harta tidak lagi dijumpai, masyarakat sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara mandiri. Sehingga pada saat itu kemiskinan bukan lagi pada definisi kekurangan harta (Milda Novtari Isda, 2021).

Dalam hal ini, masing – masing dari BPS maupun Ekonomi Islam memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar, serta kelebihan dan kekurangan pada masing – masing pengukuran kemiskinan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan pengukuran BPS dan Ekonomi Islam

	Badan Pusat Statistik	Ekonomi Islam
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menganggap bahwa orang miskin adalah orang yang tidak memiliki atau dalam kekurangan sehingga harus ditolong oleh orang atau pihak yang mampu. • Menggunakan pendekatan kemiskinan makro yang dilihat dari dimensi pengeluaran. • Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga miskin yang membuat rumah tangga miskin mampu bertahan hidup sementara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menganggap bahwa orang miskin adalah orang yang tidak memiliki atau dalam kekurangan sehingga harus ditolong oleh orang atau pihak yang mampu. • Islam salah satunya juga dari aspek pengeluaran tetapi juga memasukkan aspek pendapatan. • Memenuhi kebutuhan hidup dan usaha untuk melepaskan diri dari kemiskinan.
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya berbicara pada aspek pengeluaran minimum yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan kondisi pada saat pendataan. • Terfokus pada kebutuhan materiil. • Tidak dapat mewakili kemiskinan secara menyeluruh. • Garis kemiskinan berdasarkan pada garis kemiskinan makanan dan non makanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertimbangkan kebutuhan materiil, juga melihat dari kebutuhan spiritual seseorang. • Dalam menentukan seseorang miskin dapat digunakan sepanjang masa karena tidak ada penentuan secara khusus. • Mengukur tidak terkhusus pada makanan atau non makanan saja dan mengukur kemiskinan dengan melihat mereka yang berada dalam kekurangan.
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi lembaga referensi resmi angka kemiskinan di Indonesia. • Terfokus pada pendekatan ekonomi makro dilihat dari sisi pengeluaran memenuhi kebutuhan dasar minimum. • Dan pendekatan pengeluaran yang dilakukan juga mudah diterapkan. • Data yang dikeluarkan juga lebih cepat sehingga berguna untuk menganalisis 	<ul style="list-style-type: none"> • Islam memiliki sifat komprehensif dan holistik. • Memahami kemiskinan dari segala aspek secara menyeluruh. • Tidak terfokus pada angka/nilai komoditi tetapi juga personaliti yang dimana mampu menghubungkan kegiatan materiil dengan spiritual/ibadah.

	kemiskinan dan solusi yang harus dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat diberlakukan sepanjang masa karena tidak tergantung dengan nilai tertentu.
Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kemiskinan yang ditetapkan terlalu rendah. • Hanya dapat digunakan untuk target sasaran geografis bukan individu rumah tangga. • Data kemiskinan tersebut juga masih bersifat umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dapat diterapkan di negara muslim atau mayoritas muslim karena negara tersebut sudah lebih dulu mengadopsi prinsip non muslim. • Metode pengukuran yang memakan waktu yang cukup lama karena beberapa bagian pengukuran dilakukan secara personal.

PENUTUP

Pengukuran kemiskinan dalam Ekonomi Islam merupakan pengukuran yang mampu menggambarkan kemiskinan sebenarnya, sehingga konsep ini dapat dijadikan sebagai patokan garis kemiskinan di Indonesia, dengan parameter umum yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan hidup diatas 50% dan dibawah 100%. Untuk pendekatan pengukuran kemiskinan Ekonomi Islam, penulis menyarankan untuk menggunakan pendekatan kemiskinan CIBEST yang dikembangkan oleh Irfan Syauqi Beik dengan melihat pada kesejahteraan, kemiskinan material, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut. Karena pendekatan ini dapat memodifikasi pendekatan kemiskinan makro pada BPS terkait garis kemiskinan per kapita per bulan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga per bulan yang terdapat pada konsep kemiskinan mikro, dimana rumah tangga harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, dan penambahan yang dilakukan dalam pendekatan metode CIBEST ialah kebutuhan yang dilihat dari sisi kebutuhan spiritual. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa konsep ini mampu merangkul dan menggabungkan kelebihan dari masing-masing konsep kemiskinan yang ada di Indonesia, menjadi satu konsep baru yang disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Riyukuri, M. S. (2022). Analisis Konsep Kemiskinan (Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan Konsep Ekonomi Islam). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 No. 2.
- Basar Dikuraisyin, F. T. (2022). Penerapan Metode CIBEST Berbasis Indeks dan Kuadran dalam Memberdayakan Masyarakat di Lembaga Zakat Kota Malang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA) Volume 4, Nomor 1*, 113
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(1), Article 1.
- BPS. (2022). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/3b084878f782dfa44e0025e0/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2022.html>
- BPS. (2023). *Pengukuran Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- BPS-RI, S. S. (31 Oktober 2018). Metodologi Perhitungan Kemiskinan. *Rekonsiliasi Kemiskinan*. BPS-RI (Sumber: Romulus, 2023).
- Faturochman, F., & Molo, M. (2016). KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISRIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Populasi*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/jp.11404>
- Hamdani, H. (2015). KEMISKINAN DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH Poverty With Economic Syariah. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v9i2.87>
- Hanifah Ramadhani, N. A. (2022). Tingkat Kemiskinan Di Wilayah Kota Medan Serta Solusi Pemerintah Dalam Menanganinya. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management Vol.1, No.4*, 35.
- Isda, M. N., Ahmadsyah, I., & Hasnita, N. (2021). ANALISIS KONSEP KEMISKINAN (STUDI KOMPARATIF KONSEP BADAN PUSAT STATISTIK DAN KONSEP EKONOMI ISLAM). *Journal of Sharia Economics*, 2(1), Article 1.
- Milda Novtari Isda, I. A. (2021). Analisis Konsep Kemiskinan (Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik Dan Konsep Ekonomi Islam). *Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 1*, 18
- Muhammad Afthon Ashar, M. N. (2019). Implementasi Metode Cibest (Center Of Islamic Business And Economic Studies) dalam Mengukur Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 5*, 1059.
- Murdiyana, & Mulyana. (2017). ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA | Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Muttaqin, A. A., & Safitri, A. (2020). Analisis Pengaruh Zakat dan Infak Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan, Keparahan Kemiskinan dan Gini Rasio di Indonesia Tahun 2007-2018. *Al-Tijary*, 6(1), 51–61. <https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2416>
- Novia, D. S., dkk. (2022). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Romulus. A. N. T. (2023, January 9). *Mekanisme Pengukuran Kemiskinan* [Direct Interview (face to face)].
- Subdirektorasi Statistik Kerawanan Sosial. (31 Oktober 2018). Garis Kemiskinan. *Rekonsiliasi Kemiskinan*. BPS-RI. (Sumber: Romulus, 2023)

- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmawati, U. S., Ana, P., & Trisna, D. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kalimantan Barat. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.1571>
- Titin Suhartini, K. S. (2015). PROPORSI KEMISKINAN DI KABUPATEN BOGOR THE PROPORTION OF POVERTY IN BOGOR DISTRICT. *Sosio Informa Vol. 1, No. 02*, 161.
- Yusril Mahendra, M. K. (2021). Tipologi Kemiskinan Dengan Model Cibest Quadrant (Studi Kasus Di Kecamatan Belawa). *AT TAWAZUN, Volume 1 Nomor 3*, 96.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI INDONESIA SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42>